

## **BAB II**

# **SEJARAH POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI TIMUR TENGAH & IRAK**

Pada bab ini, penulis akan membahas tentang awal sejarah politik luar negeri Amerika Serikat dengan Timur tengah, kemudian dikhususkan lagi pada sejarah politik luar negeri Amerika Serikat dengan Irak dilanjutkan dengan menjelaskan kebijakan politik luar negeri dari Presiden George W. Bush (2001-2008), kebijakan Barack Obama (2009-2016), dan yang terakhir kebijakan Presiden Donald Trump (2017-2018) di Irak.

### **2.1 Awal Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Timur Tengah (1932-2001)**

Amerika Serikat adalah sebuah negara maju yang sangat berpengaruh di seluruh dunia, dimana keputusan terkait Negara lain terkadang berada pada negara ini. Amerika Serikat terletak di Amerika bagian Utara dan memiliki 50 negara federal yang dimana 48 negara terletak di Amerika Utara dan dua diantaranya Hawaii di samudra Pasifik dan Alaska terletak di Utara Kanada. Penduduk asli Amerika Serikat ini adalah orang Indian dan juga Eskimo. dalam hal ekonomi Amerika Serikat mempunyai erekonomian yang sangat maju pesat di berbagai bidang ditunjang dengan teknologinya yang sangat canggih dan selalu *up to date*, yang sangat terbesar sekarang adalah masih memproduksi senjata yang memberikan ketergantungan kepada setiap negara di dunia terutama Arab Saudi (Saraswati & Widianingsih, 2008).

Sejarah Amerika Serikat di Timur Tengah dimulai pada tahun 1932-1934, ketika ditemukannya sumber minyak di Timur Tengah tepatnya di Bahrain, Arab Saudi, dan juga Kuwait, dimana diketahui untuk pertama kali bahwa kawasan Timur Tengah ini adalah kawasan penghasil minyak raksasa di seluruh dunia dari itulah dimulainya sejarah Amerika Serikat datang dan mendapatkan konsesi untuk memanfaatkan hasil minyak bumi tersebut di Timur Tengah. Selain itu Timur Tengah adalah kawasan yang sangat strategis dimana kawasan ini terletak diantara benua Eropa, Afrika, dan juga Asia. Selama bertahun-tahun kerjasama ini dilakukan, namun kerjasama di kawasan tersebut lebih dominan ke Arab Saudi, lalu Amerika Serikat mendirikan perusahaan penambang minyak di Timur Tengah dengan nama Californian Arabian Standard Oil yang kemudian berkembang dan banyak negara yang ingin bergabung seperti Texas, setelah Texas bergabung perusahaan tambang minyak itu pun berubah nama menjadi Arabian Oil Company dengan syarat para konsesi memberikan pinjaman sebanyak 30.000 poundsterling dalam bentuk emas kepada pemerintah Arab Saudi pada saat itu tengah mengalami penurunan dalam hal ekonomi yang disebabkan oleh depresi dunia. Amerika Serikat pada saat itu menangani masalah keuangan itu sendiri dimana saat itu Amerika Serikat cukup rumit karena belum ada perhatian yang cukup besar untuk mendukung beroperasinya perusahaan tersebut, namun setelah pinjaman itu menghasilkan bagi Amerika Serikat khususnya pada periode Presiden Roosevelt baru disanalah dimulai intervensi yang di kemas dalam bentuk ekonomi maupun politik luar negeri. Dan karena itu Amerika Serikat semampunya mempertahankan eksistensinya memanfaatkan perusahaan tersebut terlihat dimana ekspor minyak yang dilakukan oleh Amerika Serikat setiap harinya tidak berkurang dan selalu konsisten walaupun seringkali terjadi masalah yang bisa saja menghentikan ekspor tersebut seperti peristiwa 11 September 2001 (Jatmika, 2014, pp. 136-138).

Pada tanggal 11 September 2001 kejadian yang sangat mengingatkan akan seluruh dunia yakni penabrakan pesawat bajakan ke World Trade Centre di New York City dekat dengan Washington D.C yang menelan kurang lebih tiga ribu korban yang disinyalir adalah perbuatan terorisme yang dilakukan sekelompok terorisme yakni kelompok Al-Qaeda. Respon cepat yang dilakukan oleh Amerika Serikat dibawah pemerintahan Presiden Bush pada waktu itu adalah memburuh terorisme mulai dari menyerang Afganistan, membubarkan pemerintahan Taliban, dan memburu al-Qaeda sampai ke tempat persembunyian mereka, namun yang dilakukan sekelompok Taliban ini yakni tetap mengobarkan perang gerilya. Kemudian pada tahun 2003 Presiden Bush mulai invasi Irak dengan dengan tujuan merubah rezim di Irak dengan banyak alasan yang sangat kontroversial (Wulandari, 2015) .

Saat adanya kesadaran bahwa Timur Tengah adalah kawasan yang sangat menguntungkan Amerika Serikat ingin sekali tetap menjaga eksistensinya dengan cara memperkokoh kekuasaannya di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas muslim itu, salah satunya seperti membangun pangkalan militer kawasan Dahrn, Arab Saudi pada tahun 1945, dan juga Amerika Serikat mencari sekutunya yang berada di Timur Tengah agar negara-negara yang ada di Timur Tengah dapat memperkuat suaranya di kawasan Timur Tengah tersebut begitu pula di kawasan Teluk Amerika Serikat juga menjalin hubungan baik dengan beberapa negara disana seperti Qatar, Oman, Bahrain, dan Uni Emirat Arab yang menurut Amerika Serikat negara-negara ini akan dapat diandalkan ketika eksistensi Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah mengalami ancaman. Dominannya peranan negara-negara barat dalam konflik ekonomi maupun politik yang terjadi di Timur Tengah sering sekali membuat Amerika Serikat membuat kebijakannya sendiri atas persoalan tersebut mulai dari pengusiran Irak dari Kuwait tahun (1990-1991) kemudian menjatuhkan kepemimpinan Saddam Husein dan juga

memonopoli perdamaian yang terjadi antara Arab dan juga Israel, tetapi dominasi tersebut tidak selalu berjalan mulus dimana banyak negara-negara Timur Tengah pada pertengahan 1990an yang menolak dominasi dari Amerika Serikat (Sihbudi R. , 2007, pp. 1-5)

Namun Amerika Serikat tidak hanya berdiam diri negara tersebut mempunyai cara lain agar eksistensi Amerika Serikat tetap berpengaruh di Timur Tengah dengan memberikan solusi atau perjanjian kepada negara-negara berkonflik di Timur Tengah contohnya ialah perselisihan antara Yordania dengan Israel dimana adanya perjanjian antara Yordania dan Israel untuk melakukan perdamaian setelah penandatanganan tersebut yang berlangsung pada 26 Oktober 1994 yang disaksikan oleh presiden Amerika Serikat Bill Clinton. Kejadian ini dianggap sangat bersejarah karena sejak perjanjian tersebut di tanda tangani, kedua negara tersebut resmi mengakhiri konflik yang sudah hampir setengah abad terjadi, ternyata bagi Yordania keuntungan yang didapat negara ini sangatlah besar yang dimana ternyata Amerika Serikat mempunyai janji kepada Yordania yang berisi bahwa ketika Yordania mau berdamai dengan Israel maka Amerika Serikat menghapus semua hutang-hutang Yordania kepada Amerika Serikat yang jumlahnya sangatlah besar sekitar puluhan milyar dollar dan Yordania berharap kalau negara Yordania masih di terima dikalangan negara-negara barat dan menyesali perbuatannya atas dukungan Raja Hussein kepada Irak Saddam Husein selama krisis dan perang Kuwait. Keuntungan yang sangat besar itu tidak lain dirasakan oleh Amerika Serikat dan Israel dimana sejak kejadian itu hegemony dan pengaruh politik Amerika Serikat semakin kuat khususnya di dunia Arab yang menjadikan negara-negara Arab tidak berani melawan Amerika Serikat kecuali Sudan, Libya, dan Irak namun ketiga negara ini masih merasakan tekanan dari Amerika Serikat (Sihbudi R. , 2007, pp. 132-135).

## 2.2 Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Timur Tengah Pasca Kejadian WTC 9/11 2001

Kejadian yang menimpa gedung WTC pada 11 September 2001 yang membuat kesadaran Amerika Serikat bahwa kekuatan yang dapat mengimbanginya setelah Perang Dingin usai ialah kekuatan dari politik dunia Islam. Kecemasan itu telah disampaikan secara berulang oleh cendekiawan Amerika Serikat seperti Huntington, dan juga para politisi seperti Henry Kissinger. Kekhawatiran itu yang membuat Amerika Serikat mulai mempertahankan eksistensinya di dunia ini agar kekuatan Islam tidak dapat menandinginya dan mengalahkan pengaruhnya bagi negara lain. Amerika Serikat banyak melakukan penyerangan seperti ke Afghanistan, pasca runtuhnya gedung kembar World Trade Center/ WTC (11 September 2001). Dengan alasan seperti penyerangan tersebut karena ingin menghabisi kekuatan terorisme, dan kelompok-kelompok seperti Al-Qaeda yang sangat menjadi target oleh Amerika sendiri. Kemudian Amerika membentuk pemerintahan yang baru di Afganistan dari Taliban ke Pemerintahan Karzei yang sudah pro terhadap Amerika Serikat. Namun dengan adanya kebijakan seperti itu di Afganistan orang- dengan masa pemerintahan orang yang ada disana menjadi ketakutan dan sangat membenci Amerika Serikat. Begitu juga dengan pemerintahan Saddam Hussein di Irak yang perlahan digulingkan Amerika Serikat. Meruntuhkan rezim lama dengan yang baru dan membentuk rezim yang lebih pro kepada Amerika Serikat adalah salah satu kebijakan Amerika Serikat pasca Perang Dingin berakhir dengan isu yang diangkat seperti senjata pemusnah masal dan juga kelompok-kelompok teroris yang harus di lumpuhkan, dan yang mendukung Al- Qaeda khususnya. (Rauf, 2007).

## 2.3 Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Irak

Hubungan antara kedua negara ini yakni Amerika Serikat dan juga Irak sudah tejalin sejak lama diawali dengan perang Iran-Irak yang dimana sebenarnya sebelum invasi Irak ke Kuwait terjadi Amerika Serikat adalah negara yang memperkuat rezim Saddam Hussein pada perang Iran-Irak dengan bantuan dana militer dan persenjataan. Amerika Serikat mendukung Irak untuk menjadi sekutu namun sejak terjadinya invasi Irak ke Kuwait yang secara tidak langsung memberi dampak besar bagi bisnis Amerika Serikat yang berhubungan langsung dengan Kuwait dalam bisnis minyak, Amerika Serikat secara langsung memihak Kuwait dan memukul Mundur Irak, karena pada saat itu Irak menginvasi Kuwait karena ingin merampas ladang minyak yang ada di Kuwait karena Irak kekurangan pasokan untuk membiayai perang antar negaranya dan Iran.

Irak adalah salah satu negara yang menjadi perhatian Amerika Serikat dalam segi kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat dan menyita perhatian masyarakat dunia yang lainnya pada saat kepemimpinan Presiden George W. Bush yang membuat kebijakan yang mana pada tahun 2003 Presiden Bush menginvasi Irak dan juga setelah itu berlanjut ke pemimpin selanjutnya Barack Obama dan juga masih menjadi perhatian dari Politik Luar Negeri Amerika Serikat namun kali ini berbeda yakni kebijakannya mengarah kepada membuat Irak menjadi negara yang aman dai terorisme dan juga stabil terhindar dari hal-hal negatif kemudain memerangi kelompok-kelompok ISIS yang sudah ada di Irak.

### **2.3.1 Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Era Presiden George W. Bush (2001-2008)**



**Gambar 1:** Presiden George W. Bush

Ketegangan yang terjadi antara Amerika Serikat tidak berhenti sampai saat penghentian Invasi Irak ke Kuwait oleh Amerika Serikat saja, kebijakan terus berlanjut pada saat kepemimpinan George W. Bush yang mana kebijakan tersebut berbau kekerasan militer atau hard power yang bermula pada

saat 11 september 2001 dimana Amerika Serikat dibuat gempar oleh Tragedi 11/9 dimana dimulai dari 4 pesawat yang berhasil dibajak oleh teroris 3 pesawat dari 4 pesawat bajakan menghantam gedung-gedung berharga milik Amerika Serikat salah satu gedung terbesar di pusat kota Amerika Serikat yakni 2 pesawat menghantam World Trade Centre (WTC) yang dianggap sebagai simbol kapitalisasi Amerika Serikat dan 1 pesawat ditabrakkan ke Gedung Pentagon yang dianggap sebagai gedung paling aman sedunia. Ternyata diketahui terror yang diberikan tersebut dilakukan oleh kelompok teroris dari Timur Tengah yang di pimpin oleh Osama bin Laden yang bernama Al- Qaeda dan disinyalir bahwa presiden Irak juga ikut serta dalam otak penabrakan pesawat ke gedung-gedung tersebut. Akibat dari Tragedi tersebut Amerika Serikat dibawah Presiden Bush langsung mengeluarkan dokumen Strategi Keamanan Nasional (National Security Strategy-NSS) yang diterbitkan bulan September 2002. Di sana disebutkan adanya tiga prinsip penting doktrin Bush: Pertama, mempertahankan kepemimpinan Amerika Serikat di dunia. Kedua, melakukan pre-emptive attack terhadap ancaman potensial Amerika Serikat. Ketiga, menyebarkan prinsip demokrasi liberal (Jatmika, 2014, p. 141). Akhir dari keluarnya dokumen tersebut dan adanya dugaan Irak ikut terlibat maka Amerika Serikat melahirkan sebuah kebijakan yakni melakukan Invasi terhadap Irak pada tahun 2003.

Pada tanggal 19 Maret Invasi Irak 2003 dengan kode "Operasi Pembebasan Irak" secara resmi telah dimulai. Dengan tujuan resmi Amerika Serikat untuk melucuti senjata pemusnah masal Irak yang belum tentu benar, kemudian mengakhiri dukungan Saddam Hussein atas terorisme, dan juga memerdekakan rakyat Irak dari pemimpin yang ditaktor. Sebelum Invasi terjadi pada tanggal 18 februari 2003 persiapan dilakukan dengan menyiapkan sekitar 100.000 tentara Amerika Serikat yang dimobilisasikan ke Kuwait, Amerika Serikat mendapatkan dukungan dari 20 negara dan suku kurdi yang



berada di Irak Utara. Inilah puncak perselisihan antara dua negara sekaligus sebagai pembuka perang Irak. Namun dampak yang signifikan yang dirasakan oleh masyarakat a bagi mereka karena banyak masyarakat biasa yang tidak berdosa menjadi korban karena sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, air bersih, dan listrik, dan juga infrastruktur penting yang rusak semperti masjid, rumah sakit, sekolah, dan juga yang lainnya.

Memasuki pekan ketiga pada tanggal 9 April 2003, pasukan darat berhasil masuk ke kota Baghdad dan Patung Saddam Hussein yang berada di sana dirutuhkan oleh masyarakat Irak dan menandakan bahwa Pemerintahan Irak telah berakhir dan perang pun dinyatakan berakhir dengan dikuasanya kota Baghdad, yang merupakan pusat pemerintahan Saddam Hussein, oleh pasukan Amerika Serikat dan sekutu. Kemenangan pasukan koalisi sekaligus menandai berakhirnya rezim Saddam Hussein di Irak. Perang ini telah menelan banyak orang harus kehilangan nyawa maupun mengalami luka-luka baik dari kalangan militer maupun non-militer terutama dari pihak Irak, tercatat sebanyak 4.895 - 6.370 korban berasal dari pihak Irak, sedangkan dari pasukan koalisi tercatat kurang lebih 183 korban.

### **2.3.2 Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Era Presiden Barack Obama (2009-2016)**



**Gambar 2:** Presiden Barack Obama

Menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat hingga dua periode Barack Obama tetap mendukung sekaligus memerangi terorisme seperti ISIS yang berada di Timur Tengah. Berbagai kebijakan luar negeri dan koalisi internasional pun telah dilakukan. Serangan militer dan juga diplomasi-diplomasi lainnya tetap menjadi senjata utama Obama yang menekankan demokrasi di negara-negara Timur Tengah.

Saat kampanye pertamanya tahun 2008 Obama sebelum terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat menegaskan tujuan politik luar negerinya berjanji akan mengembalikan tentara Amerika Serikat yang tengah melawan ISIS di Irak karena menurutnya kebijakan Presiden George W. Bush itu salah dengan meningkatkan tentara Amerika Serikat di Irak pada tahun 2006 akan membuat Amerika Serikat menggelontarkan dana US\$ 10 miliar untuk setiap bulannya. tetapi, berbeda dengan Obama tentang terorisme, Obama tetap bertujuan untuk mengamankan dunia dari senjata pemusnah massal, bahan dasar nuklir, serta ancaman terorisme dan

negara-negara yang mendukung terorisme. Perang yang terjadi terhadap jaringan terorisme di Afghanistan akan menjadi prioritas utama pemerintahan Barack Obama (liputan6, 2008).

Kemudian Obama menjalankan janjinya ketika beliau terpilih. Pada tanggal 27 Februari 2009, Obama mengumumkan bahwa operasi pertempuran di Irak akan berakhir dalam 18 bulan. Pernyataan ini ditujukan kepada tentara-tentara yang akan ditempatkan di Afghanistan. Obama mengatakan, "Saya katakan dengan jelas, pada 31 Agustus 2010, misi pertempuran kita di Irak akan berakhir." (Feller, 2009). Penarikan pasukan diperkirakan akan di tarik dan tuntas pada Agustus 2010 dan mengurangi jumlah tentara dari 142.000 orang menjadi pasukan transisi berkekuatan 50.000 orang di Iraq hingga akhir 2011. Pada 19 Agustus 2010, brigade tempur AS terakhir keluar dari Irak. Tentara yang tersisa dialihkan ke operasi yang lainnya, Obama mengatakan bahwa Amerika Serikat mempunyai misi baru di Irak.

Setelah misi perang "Kebebasan Irak" harus diakhiri karena setelah 7 tahun dan investasi sebesar USD 900 miliar harus di dimanfaatkan, digantikanlah dengan, misi 'Fajar Baru' yang akan menjadi tugas para diplomat. Namun, sekitar 50 ribu tentara tetap bertahan di Irak hingga akhir 2011. Mereka akan membantu proses pembersihan pangkalan militer dan urusan logistik serta mereka akan berjaga-jaga jika ada kekacauan dan perang saudara yang banyak dipredik oleh banyak pihak (Pasuhuk, 2010).

Pada periode kedua Barack Obama menjadi Presiden Amerika Serikat, Obama melanjutkan kebijakan yang akan dilanjutkan di Irak yang sebelumnya menarik banyak pasukan Amerika Serikat dari Irak untuk mengakhiri misi pertempuran dan cenderung melakukan soft diplomacy, Obama memiliki tujuan politik luar negeri yang berbeda dari periode sebelumnya. Obama melihat bahwa ISIS ini adalah sebuah

ancaman yang serius yang dapat menghambat proses- proses demokrasi dan kerjasama antara Amerika Serikat dengan Irak dan juga Suriah. Hingga pada periode keduanya memimpin negara adidaya tersebut, Obama menyatakan bahwa ISIS ialah musuh bersama dan harus diberantas. Pada September 2014, Obama dalam pidatonya menyikapi ISIS menyebut empat strategi, dengan tujuan utama menghabisi dan mengakhiri teror ISIS sampai ke akar-akarnya (Haryono, 2014).

Empat strategi Obama dalam memerangi ISIS:

1. Amerika Serikat akan melakukan serangan udara bersama Irak. Mereka akan memperluas wilayah serangan dan perlindungan bagi warga Irak, misi kemanusiaan, dan warga Amerika Serikat di sana.
2. Amerika Serikat akan meningkatkan serangan darat bersama pasukan Irak dan Kurdi, salah satunya dengan mengirimkan 475 pasukan tambahan. Pasukan yang dikirim termasuk memberikan pelatihan kecerdasan dan peralatan. Sedangkan di Suriah, Obama juga akan meningkatkan kewaspadaan. Namun, Amerika masih terbentur oleh rezim Bashar al-Assad yang disebut Obama sebagai rezim yang meneror rakyatnya dan sebuah rezim yang tidak akan pernah mendapatkan kembali legitimasi tersebut.<sup>20</sup>
3. Amerika Serikat akan terus mengandalkan kemampuan substansial kontraterorisme untuk mencegah serangan ISIS. Obama mengatakan “Bekerja dengan mitra kami, kami akan melipatgandakan usaha kita untuk memotong pendanaannya; meningkatkan kemampuan intelijen kita, memperkuat pertahanan kami; melawan ideologi menyesatkan mereka dan membendung gelombang masuknya militan asing ke dan dari Timur Tengah”.
4. Amerika Serikat akan terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil tak berdosa yang

telah kehilangan tempat tinggal akibat ulah ISIS. ”Ini termasuk Muslim Sunni dan Muslim Syiah yang berisiko (diserang ISIS), serta puluhan ribu orang Kristen dan minoritas agama lainnya. Kita tidak bisa membiarkan komunitas ini diusir dari tanah air mereka,” kata Obama seperti dikutip Reuters. “Ini adalah strategi kami. Dan di masing-masing empat bagian dari strategi kami, Amerika akan bergabung dengan koalisi yang luas dari mitra-mitra kami (Muhaimin, 2014).

Seiring berjalannya strategi yang dimiliki Obama dibantu oleh negara-negara koalisi, tercatat sejak agustus 2014 lalu sekitar 16 ribu serangan udara dilancarkan terhadap ISIS di wilayah Irak dan Suriah. Yang setidaknya telah menelan korban sedikitnya 50 ribu militan radikal ISIS tewas. Jumlah tersebut tercatat sejak serangan udara koalisi Amerika Serikat dimulai tahun 2014 dengan menggunakan pesawat dan drone pesawat tanpa awak. Koalisi Amerika Serikat juga memberikan pelatihan militer serta menyalurkan persenjataan untuk pasukan lokal yang bertempur langsung melawan ISIS. Dijelaskan pula oleh pejabat militer Amerika Serikat itu, koalisi pimpinan Amerika Serikat telah menyusutkan jajaran ISIS hingga ke level dimungkinkannya serangan secara serempak terhadap posisi ISIS di Mosul, Irak dan Raqqa, Suriah dimana wilayah tersebut merupakan markas terakhir ISIS (Christiastuti, 2016).

### 2.3.3 Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Era Presiden Donald Trump (2017-2018)



**Gambar 3:** Presiden Donald Trump

Sejak pergantian Presiden Barack Obama ke Presiden Donald Trump banyak kebijakan yang ekstrim dilakukan Trump seperti kebijakan yang memicu protes massal yakni kebijakan anti imigran terutama dari negara-negara muslim seperti Irak, Iran, Somalia, Sudan, Yaman, dan Libya yang bertujuan agar para terduga teroris keluar dari Amerika Serikat dengan alasan demi keamanan nasional yang merujuk pada serangan teroris di Paris, London, Brussels, dan Berlin. Dan untuk sementara pemerintah tengah mengkaji sistem untuk pemeriksaan pengungsi dan juga pemohon visa dari negara-negara tertentu di dunia. Namun setelah Pentagon dan Deplu Amerika Serikat mengingatkan bahwa sekarang Irak adalah salah satu negara yang memerangi ISIS, kedua instansi itu meminta ke Gedung Putih untuk mengecualikan Irak dalam larangan tersebut (kompas.com, 2017).

Berbeda dengan Presiden sebelumnya Trump tidak lagi berfokus pada pemerintah Irak mungkin karena Irak telah memiliki pemerintahan yang lebih pro terhadap Amerika Serikat. Trump berfikir bahwa seharusnya Amerika Serikat harus di bayar untuk mengamankan sebuah negara yang berkonflik malah bukan menghabiskan anggaran untuk melindungi negara lain, pada desember akhir 2018 Trump berkunjung ke Irak bersama istrinya dan mengumumkan bahwa pasukan di Suriah akan di tarik namun pasukan yang ada di Irak tetap tidak ada penarikan karena Trump ingin menjadikan pangkalan militer di Irak untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang emergency di Suriah (Hidayat, 2018).

### **2.3 Kesimpulan**

penjelasan dalam bab ini memberikan gambaran umum tentang kebijakan yang awalnya hanya melakukan hubungan baik seperti melakukan hubungan bilateral yang telah dibangun oleh Amerika Serikat yang di dasari oleh kepentingan impor minyak kemudian berubah menjadi intervensi di kawasan Timur Tengah khususnya di Irak, penjelasan tentang masalah ini cukup penting untuk melihat perubahan dalam hubungan antara kedua negara ini yang semula terhubung dengan baik dan berubah menjadi kondisi berkonflik yang menyebabkan Amerika Serikat melakukan intervensi terhadap Irak, namun terlihat disini adanya perbedaan kebijakan dari beberapa presiden mulai dari Presiden George W. Bush yang sangat menggebu-gebu dalam melakukan kebijakan di Irak dengan kebijakan yang hard power, kemudian berubah dengan Presiden Barack Obama dengan kebijakannya yang soft power, dan diikuti oleh Presiden Donald Trump yang sekarang kebijakannya malah tidak terlalu fokus pada Irak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Christiastuti, N. (2016). *50 Ribu Militan ISIS Tewas dalam Serangan Koalisi di Irak dan Suriah Sejak 2014*. Washington: Detiknews.
- Feller, B. (2009). *Obama Sets Firm Withdrawal Timetable for Iraq*. Jacksonville: The Gazzete.
- Haryono, W. (2014). *Rival Politik Puji Pidato Obama soal ISIS*. Washington: MetroTVnews.Com.
- Hidayat, F. (2018). *Donald Trump Kunjungi Militer AS di Irak*. Al- Asad: detiknews.com.
- Jatmika, s. (2014). *Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah*. Yogyakarta: Maharsa Publishing House.
- kompas.com, i. (2017). *Kebijakan Anti-imigran Trump Direvisi, Irak Dicabut dari Daftar "Muslim Ban"*. Washington DC: kompas.com.
- liputan6. (2008). *Obama Janji Tarik Pasukan AS dari Irak*. Washington: Liputan6.com.
- Muhaimin. (2014). *Begini Jurus Obama Tumpas Habis ISIS*. Washington: SindoNews.Com.
- Pasuhuk, H. (2010). *AS Mulai Tarik Pasukan dari Irak Akhir Agustus*. Anbar: DW.Com.
- Rauf, I. F. (2007). *Seruan Adzan Dari Puing WTC dakwah islam di jantung Amerika Pasca 9/11*. Bandung: Mizan Pustaka.



- Saraswati, M., & Widianingsih, I. (2008). *Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: Penerbit Grafindo Media Pratama.
- Sihbudi, R. (2007). *Menyandera Timur Tengah: Kebijakan AS dan Israel atas Negara-Negara Muslim*. Jakarta Selatan: Mizan Publika.
- Wulandari, D. A. (2015). Agresi Amerika Serikat Terhadap Irak Periode 2003-2010. *Journal Of International Relations*, 1(2), 132-140.